

Pengantar

Kontribusi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Veti dan Pangestika, 2022). PKH memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga penerima manfaat, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan kesehatan. Sedangkan BPNT memberikan akses terhadap bahan pangan yang berkualitas dan beragam, sehingga dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dalam jangka panjang, peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut (Handadi 2020).

PKH dan BPNT juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan di Kelurahan Purwodadi. Melalui bantuan dari PKH dan BPNT, keluarga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya seperti membeli buku, membiayai transportasi, dan biaya sekolah. Dalam jangka panjang, akses pendidikan yang baik dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Selain itu, PKH dan BPNT juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, khususnya bagi pedagang yang bekerja sama dengan BPNT dalam menjual bahan pangan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka dan pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian di desa-desa dan kelurahan.

Berdasarkan beberapa bukti di lapangan terkait bantuan sosial PKH dan BPNT, beberapa diantaranya adalah pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar Rp 47 triliun untuk program tersebut, dengan jumlah penerima program mencapai 10,7 juta keluarga (dilansir dari Kompas.com, 21 April 2020). Selain itu, program PKH juga telah membantu 10 juta keluarga miskin di Indonesia selama satu dekade, memberikan bantuan uang tunai dan layanan pendidikan serta kesehatan untuk membantu keluarga miskin keluar dari kemiskinan (dilansir dari CNN Indonesia, 2021). Hasil studi juga menunjukkan bahwa program BPNT memiliki dampak positif bagi keluarga penerima manfaat, terutama dalam hal peningkatan akses makanan bergizi dan kesehatan (dilansir dari Republika.co.id,

Sebuah jurnal dari Susanto, Puspaningrum, dan Neneng (2021) dengan judul “Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat” juga menyoroti masalah serupa di Indonesia. Dalam jurnal tersebut, penulis menjelaskan bahwa kebijakan bantuan sosial di Indonesia terkesan kurang efektif karena masih terdapat penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penerima bantuan sosial, dan masih terdapat peluang terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial. Alfredo, Halim, dan Azmi (2020) juga menjelaskan bahwa sistem informasi yang digunakan untuk mendata penerima bantuan sosial masih terbatas dan belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memperbaiki sistem informasi dan proses penyaluran bantuan sosial di Indonesia agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, BPK sebagai lembaga pengawas dan pengendali keuangan negara berperan penting untuk melakukan audit dan memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian,

diharapkan bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Akibat kesalahan - kesalahan tersebut, maka alokasi penerimaan bansos tidak dapat berjalan secara optimal. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Lampiran II Permendes No.6 Tahun 2020, penanggung jawab penyaluran bansos adalah Kepala Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan merupakan pemimpin yang ada di desa yang menerapkan fungsi dari pemerintah desa/kelurahan itu sendiri yaitu fungsi pembangunan (Haryadi 2018). Salah satu Kepala Desa/Kelurahan yang saat ini memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan program bansos adalah Kepala Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Meskipun telah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir, masih perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana kontribusi bantuan PKH dan BPNT dalam mensejahterakan masyarakat Kelurahan. Masyarakat Kelurahan merupakan salah satu kelompok yang menjadi sasaran utama dari program bantuan sosial ini, mengingat sebagian besar penduduk miskin dan rentan di Indonesia berada di

menurut Octavia (2020) dan Vetri Fadillah and Pangestika Rizki Utami (2022) antara lain adalah pemberian bantuan yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program, dan adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan bantuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dan saran kepada pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Misalnya, penelitian dapat merekomendasikan program pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan sosial tersebut, atau menyarankan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian yang berfokus pada kontribusi bantuan PKH dan BPNT dalam mensejahterakan masyarakat Kelurahan memiliki penting yang besar dalam mengembangkan dan meningkatkan program bantuan sosial di Indonesia, terutama di daerah perdesaan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dari penjelasan yang penulis berikan di atas, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan judul penelitian "Kontribusi Bantuan PKH Dan BPNT terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan".

Metode

Berdasarkan Milles dan Huberman (2007:34), data kualitatif berbentuk deskripsi dan merupakan unsur penting dari banyak sosiologi, khususnya antropologi, sejarah, dan politik.

Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Kebijakan Bantuan Sosial Pada Bantuan Langsung Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Purwodadi Kota Malang.

Instrumen dan cara yang dipakai mendapat informasi harus akurat dan tepat. cara memperoleh informasi yang dipakai penulis untuk studi ini yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kajian Teori

Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (PKH)

kualitas gizi anak-anak. Namun, program ini juga dihadapkan pada beberapa kendala seperti kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan rendahnya kualitas data.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi bantuan PKH dan BPNT dalam Mensejahterakan Masyarakat Kelurahan

Berdasarkan data tingkat kesehatan masyarakat di Kelurahan Purwodadi selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat kesehatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, salah satunya adalah program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk dalam hal akses pangan dan kesehatan. Dalam konteks tingkat kesehatan, PKH memberikan dampak positif dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, seperti pemeriksaan

kesehatan rutin, imunisasi, dan program kesehatan lainnya. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat di Kelurahan Purwodadi dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka.

Selain itu, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga berperan dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Melalui BPNT, masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Dengan memastikan asupan pangan yang mencukupi, masyarakat di Kelurahan Purwodadi memiliki kesempatan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kesehatan masyarakat di Kelurahan Purwodadi. Melalui bantuan ini, masyarakat miskin dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pangan yang cukup dan bergizi. Dengan

meningkatnya kesehatan masyarakat, diharapkan kualitas hidup mereka juga meningkat, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam membandingkan kedua data hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa perubahan yang dapat mempengaruhi kontribusi bantuan PKH dan BPNT di Kelurahan Purwodadi. Pada data pendapatan terjadi sedikit peningkatan pendapatan pada sebagian individu antara tahun 2021 dan 2022. Misalnya, pendapatan Ibu Sarah naik dari Rp650 menjadi Rp850, dan pendapatan Ibu Khodijah naik dari Rp300 menjadi Rp500. Peningkatan pendapatan ini dapat berdampak positif terhadap kontribusi bantuan PKH dan BPNT, karena jika pendapatan individu meningkat, mereka mungkin memerlukan bantuan sosial dalam skala yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pada item Pengeluaran Makanan Pokok dalam kedua data, pengeluaran makanan pokok cenderung mencerminkan sebagian besar pendapatan individu. Terdapat perbedaan dalam jumlah pengeluaran makanan pokok antara individu, tergantung pada pendapatan mereka.

Namun, secara umum, pengeluaran makanan pokok telah meningkat pada beberapa individu antara tahun 2021 dan 2022. Contohnya, Ibu Sarah meningkatkan pengeluaran makanan pokok dari Rp351 menjadi Rp459. Peningkatan ini dapat menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap pangan yang lebih baik melalui kontribusi bantuan PKH dan BPNT.

Pengeluaran Pendidikan dan Kesehatan: Dalam kedua data, pengeluaran pendidikan dan kesehatan juga dapat memberikan gambaran tentang kontribusi bantuan PKH dan BPNT terhadap sektor ini. Terdapat beberapa perubahan dalam pengeluaran pendidikan dan kesehatan pada individu-individu tertentu. Sebagai contoh, Ibu Sutiasih dan Ibu Nurifah memiliki pengeluaran pendidikan dan kesehatan yang tetap stabil dari tahun 2021 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan PKH dan BPNT mungkin tidak memberikan dampak langsung dalam pengeluaran sektor ini pada individu tersebut. Namun, perubahan lain seperti peningkatan pengeluaran pendidikan dan kesehatan pada individu lain seperti Ibu Sarah dan Ibu Khodijah dapat menunjukkan dampak positif dari bantuan tersebut.

Dalam keseluruhan, perubahan dalam data pengeluaran dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan beberapa indikasi bahwa bantuan PKH dan BPNT dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Purwodadi. Peningkatan pendapatan, pengeluaran makanan pokok, dan pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat mengindikasikan peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan sosial yang penting. Namun, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami dampak yang lebih spesifik dari bantuan PKH dan BPNT terhadap kontribusi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Purwodadi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT di masyarakat Kelurahan

Dalam wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor pendukung yang memfasilitasi komunikasi yang baik antara koordinator, pengurus bantuan, dan perangkat kelurahan. Komunikasi yang efektif dan terbuka antara pihak-pihak terlibat merupakan aspek penting dalam menjalankan kegiatan bantuan. Adanya komunikasi yang baik memungkinkan

informasi terkait kegiatan bantuan dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Selain itu, respons yang cepat dari perangkat desa terhadap koordinator penyelenggara kegiatan bantuan juga menjadi faktor pendukung dalam kelancaran pelaksanaan bantuan. Ketika perangkat desa dapat merespon dengan cepat terhadap permintaan atau arahan dari koordinator, maka penyelesaian masalah atau koordinasi dapat dilakukan secara efisien. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat juga merupakan faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan bantuan. Ketika masyarakat mendukung dan mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pengurus dan koordinator, maka pelaksanaan kegiatan bantuan akan menjadi lebih lancar dan efektif.

Dalam proses pelaksanaan bantuan PKH dan BPNT di kelurahan Purwodadi, juga terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait instrumen dan mekanisme pengajuan bantuan. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengajukan bantuan yang dibutuhkan dan memperlambat proses pelaksanaan. Selain itu,

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bantuan PKH dan BPNT di kelurahan Purwodadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik antara koordinator, pengurus bantuan, dan perangkat kelurahan menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan bantuan. Respons yang cepat dari perangkat desa dan partisipasi serta dukungan masyarakat juga berperan dalam menjalankan kegiatan bantuan dengan efektif. Namun, terdapat faktor penghambat seperti kurangnya pendidikan masyarakat terkait pengajuan bantuan, perbedaan data antara pusat dan daerah, serta ketidaksesuaian antara pengajuan data baru dan perubahan data lama di pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfedo, Juan Maulana, Rama Halim, and Nur Azmi. 2020. "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Rumusan Konsep Dan Pengaturan." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6(2):283-96. doi: 10.32697/integritas.v6i2.668.
- Antara News. (2021, Januari 16). Penerima Manfaat BPNT di Kudus Terima Kartu ATM. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/2081066/penerima-manfaat-bpnt-di-kudus-terima-kartu-atm>
- BPK.go.id (2020). Wartapemeriksa. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=35712>
- CNN Indonesia. (2021, September 11). Dampak PKH di Masyarakat: Menumbuhkan Ekonomi Pedesaan hingga Jauh dari Kemiskinan. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210911131209-92-689187/dampak-pkh-di-masyarakat-menumbuhkan-ekonomi-pedesaan-hingga-jauh-dari-kemiskinan>
- Handadi, Sanggit. 2020. "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Karawang." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(2):408-20.
- Haryadi, Mustafa. 2018. "Implementasi Bantuan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kelurahan Larangan Selatan." *Journal of Materials Processing Technology* 1(1):1-8.

- Kasmad, Rulinawaty. 2021. "Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Pendahuluan Dampak Sosial Dan Ekonomi Yang Diakibatkan Pandemi COVID-19 Sangat Berpengaruh." Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta: 2:349-60.
- Kompas.com. (2020, April 14). Pemerintah Jamin Program BPNT untuk Warga Terdampak Covid-19. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/14371401/pemerintah-jamin-program-bpnt-untuk-warga-terdampak-covid-19>
- Milles, Mathew B dan Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Octavia, Rahma Dwi. 2020. "Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)." Jurnal Teknologi Informasi 4(2). doi: 10.36294/jurti.v4i2.1845.
- Pertiwi, Mirna Tri. 2020. "Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Sudimara Jaya." Jurnal Ekonomi Dan Bisnis UIN Jakarta 8(75):147-54.
- Republika.co.id. (2020, Maret 30). Kemensos Tetap Salurkan Program PKH Selama Pandemi Covid-19. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/q8v06c428/kemensos-tetap-salurkan-program-pkh-selama-pandemi-covid19>
- Samberan, A. (2022). Berikut Penjelasan Tentang Tahapan BPNT Yang Cair Saat Ini!!!. Diambil dari <https://samberan-bjn.desa.id/artikel/2022/9/18/berikut-penjelasan-tentang-tahapan-bpnt-yang-cair-saat-ini#:~:text=BPNT%20atau%20Bantuan%20Pangan%20Non,langsung%20tunai%20dan%20non%20tunai>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

Sari, Meri Enita Puspita, and Diah Ayu Pratiwi. 2018. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam." *Jurnal Trias Politika* 2(2):137. doi: 10.33373/jtp.v2i2.1464.

Suara.com. (2021, Maret 31). Dana PKH Naik, Warga Miskin di Ponorogo Capai Rp 450 Ribu per Bulan. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2021/03/31/212221/dana-pkh-naik-warga-miskin-di-ponorogo-capai-rp-450-ribu-per-bulan>

Suryahadi, A., Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Susanto, Erliyan Redy, Ajeng Savitri Puspaningrum, and Neneng Neneng. 2021. "Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Tekno Kompak* 15(1):1. doi: 10.33365/jtk.v15i1.915.

Veti, Fadillah, and Rizki Utami Pangestika. 2022. "Pelaksanaan Program Pemerintah Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid – 19 Di Kelurahan Sokanegara." *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat* 2(2):120–32. doi: 10.22373/jrpm.v2i2.1410.